

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
SIMPOSIUM NASIONAL PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA
PERINGATAN PERISTIWA BERSEJARAH HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAM*) DIY
TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan

Nama kegiatan ini adalah “Simposium Nasional Penegakan Kedaulatan Negara”

2. Latar Belakang

Serangan tentara Belanda atas Yogyakarta pada 19 Desember 1948 menyebabkan jatuhnya ibu kota Republik Indonesia saat itu. Meskipun serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas kesepakatan yang ditandatangani di atas USS Renville, bagaimanapun juga Belanda berhasil melumpuhkan pemerintahan sipil Republik dan menawan para pemimpinnya. Dengan serangan tersebut Belanda mengklaim di muka dunia internasional bahwasanya Republik Indonesia bukanlah lagi sebuah entitas yang nyata dan pantas untuk diajak untuk berunding sejajar dengan negeri Belanda.

Indonesia saat itu menghadapi situasi yang amat sulit untuk mempertahankan kemerdekaan. Segala pihak mulai dari para pemimpin Indonesia yang berlaku menggantikan peran para pemimpin yang ditawan hingga para diplomat Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membutuhkan suatu bukti bahwa Indonesia masih ada. Untuk itulah muncul sebuah inisiatif untuk memberikan pembuktian tersebut.

Dengan upaya untuk menarik perhatian Dewan Keamanan (DK) PBB yang akan bersidang, mengemukakan sebuah prakarsa untuk melancarkan serangan yang cukup signifikan skalanya. Hal ini ditujukan tidak lain adalah untuk menarik perhatian berbagai negara di dunia agar kembali membahas permasalahan Indonesia di DK PBB. Oleh sebab itulah ide tersebut menjelma dan terwujud menjadi Serangan Umum 1 Maret 1949.

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi sebuah peristiwa penting dalam rangkaian sejarah mempertahankan kemerdekaan. Berkat kesuksesan pasukan TNI merebut Yogyakarta selama 6 jam, serangan tersebut berpengaruh cukup besar untuk menarik perhatian pucuk kepemimpinan militer Belanda di Indonesia. Selain itu berita adanya serangan besar yang berhasil tersiar ke luar negeri menarik perhatian DK PBB. Berkat serangan tersebut akhirnya dunia internasional memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan dengan Republik. Sampai

akhirnya Indonesia berhasil mencapai pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar.

Oleh karena pentingnya peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam sejarah perjuangan bangsa, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkannya agar diperingati secara nasional. Pada tahun 2022 Presiden Republik Indonesia menyetujui usulan tersebut dan mengesahkannya ke dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Setelah disahkannya Keputusan Presiden tersebut Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan berusaha memperingati hari besar tersebut dengan berbagai cara baru yang lebih inovatif. Satu cara yang diusulkan adalah dengan menyelenggarakan sebuah simposium bertema seputar memaknai penegakan kedaulatan negara di masa kini, yang membahas di antaranya dari bidang budaya, politik, hukum, dan ekonomi.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyelenggaraan simposium ini adalah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Hari Penegakan Kedaulatan Negara dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia di masa kini.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mendorong masyarakat untuk memaknai penegakan kedaulatan secara ilmiah dari berbagai sisi, seperti budaya, politik, ekonomi, dan menganalisisnya untuk mencapai kemajuan bangsa di masa datang.

4. Sasaran

Sasaran dari Simposium Nasional Penegakan Kedaulatan Negara adalah masyarakat umum dan para pemangku kepentingan, baik di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di tingkat nasional.

5. Lokasi Kegiatan

Tempat penyelenggaraan kegiatan adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Referensi Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
- j. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan;
- n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);

7. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari Simposium Nasional Penegakan Kedaulatan Negara ini adalah:

- a. Terkumpulnya karya akademik mengenai pemaknaan penegakan kedaulatan negara dari berbagai bidang dan dari berbagai akademisi dari seluruh Indonesia.
- b. Partisipasi penuh para pemangku kepentingan baik di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya dari seluruh penjuru Indonesia.

- c. Tersusunnya sebuah dokumen prosiding yang dapat memberikan manfaat substansial bagi pemajuan keilmuan dan upaya mencapai kemajuan bangsa di masa datang.

8. Keluaran Kegiatan

Bentuk keluaran kegiatan ini adalah sebuah dokumen yang dapat memberikan gambaran, arah, dan pedoman dalam upaya memajukan Indonesia dan menegakkan kedaulatan negara di berbagai bidang seperti budaya, politik, ekonomi, dst.

9. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Spasial

Fokus kewilayahan dari simposium ini adalah Negara Republik Indonesia.

b. Ruang Lingkup Materi

Rencananya penyelenggaraan simposium ini sekurang-kurangnya memuat pembahasan mengenai:

- 1) Permasalahan-permasalahan budaya, politik, hukum, dan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini;
- 2) Upaya menemukan solusi bagi permasalahan budaya, politik, hukum, ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini guna mencapai kemandirian dan kedaulatan negara di bidang-bidang tersebut.
- 3) Upaya memperkuat jalinan kerja sama antara pemangku kepentingan dari berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah guna mencapai kedaulatan negara dalam bidang kebudayaan, politik, hukum, ekonomi.
- 4) Langkah-langkah konkret yang dapat Daerah Istimewa Yogyakarta lakukan dalam membantu mewujudkan kemandirian dan kedaulatan negara di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, hukum, dst., di Indonesia.

10. Teknis Pelaksanaan

Simposium Nasional Penegakan Kedaulatan Negara rencananya akan dilaksanakan secara luring dan daring pada 19-21 Februari 2025.

Simposium diselenggarakan dengan mendatangkan beberapa narasumber dan peserta langsung ke tempat acara, serta memberikan kesempatan bagi khalayak umum untuk berpartisipasi melalui Zoom maupun kanal Youtube Dinas Kebudayaan DIY tasteofjogja disbud diy.

11. Bentuk Kegiatan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) menyelenggarakan kegiatan Simposium Penegakan Kedaulatan Negara.

Penjabaran pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pra-Simposium

a. Pengumpulan Karya

Untuk mempersiapkan simposium ini Dinas Kebudayaan akan membuka *call for paper* bagi masyarakat luas untuk mengumpulkan karya akademik yang sesuai dengan tema yang ditentukan.

b. Seleksi Karya

Setelah karya terkumpul Dinas Kebudayaan DIY akan menyeleksi karya yang masuk dan memilih makalah yang layak ditampilkan dalam simposium.

2. Simposium

a. Pembukaan

Pada sesi ini akan disampaikan sambutan oleh Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan paparan *keynote speaker* dari beberapa tokoh penting di tingkat nasional.

b. Paparan

Dalam sesi ini para narasumber yang dipilih dari makalah yang terseleksi akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan karya mereka

c. Penutup

3. Pasca Simposium

Setelah simposium berakhir makalah-makalah terpilih akan disusun dan dipublikasikan dalam bentuk prosiding yang disebarluaskan kepada masyarakat umum.